



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
KODE REKENING AKRUAL

Tahun Anggaran 2020

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1	<b>ASET</b>		
1.1	<b>ASET LANCAR</b>		
1.1.1	<b>Kas</b>	D	
1.1.1.01	Kas di Kas Daerah		
1.1.1.02	Kas di Bendahara Penerimaan		
1.1.1.03	Kas di Bendahara Pengeluaran		
1.1.1.04	Kas di BLUD		
1.1.1.05	Kas di Bendahara FKTP		
1.1.1.06	Kas di Bendahara BOS		
1.1.1.07	Kas Lainnya di Bendahara BOS		
1.1.1.08	Kas Lainnya		
1.1.2	<b>Investasi Jangka Pendek</b>	D	
1.1.2.01	Investasi dalam Saham		
1.1.2.02	Investasi dalam Deposito		
1.1.2.03	Investasi Dalam SUN		
1.1.2.04	Investasi Dalam SBI		
1.1.2.05	Investasi Dalam SPN		
1.1.2.06	Investasi Jangka Pendek BLUD		
1.1.2.07	Investasi Jangka Pendek Lainnya		
1.1.3	<b>Piutang Pendapatan</b>	D	
1.1.3.01	Piutang Pajak Daerah		
1.1.3.02	Piutang Retribusi		
1.1.3.03	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1.1.3.04	Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
1.1.3.05	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
1.1.3.06	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya		
1.1.3.07	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		
1.1.3.08	Piutang Pendapatan Lainnya		
1.1.4	<b>Piutang Lainnya</b>	D	
1.1.4.01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		
1.1.4.02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		
1.1.4.03	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX		
1.1.4.04	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah XXX		
1.1.4.05	Piutang Uang Muka		
1.1.4.06	Panjar Kegiatan		
1.1.4.07	Piutang Denda		
1.1.4.08	Piutang Jasa Giro		
1.1.4.09	Piutang Jasa Bunga Deposito		
1.1.4.10	Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD		
1.1.4.11	Uang Muka Operasional		
1.1.5	<b>Penyisihan Piutang Lainnya</b>	D	
1.1.5.01	Penyisihan Piutang Pendapatan XXX		
1.1.5.02	Penyisihan Piutang Lainnya		
1.1.6	<b>Belanja Dibayar Dimuka</b>	D	
1.1.6.01	Beban Pegawai Dibayar Dimuka		
1.1.6.02	Beban Barang Dibayar Dimuka		
1.1.6.03	Beban Jasa Dibayar Dimuka		
1.1.6.04	Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		
1.1.6.05	Beban Lainnya Dibayar Dimuka		
1.1.7	<b>Persediaan</b>	D	
1.1.7.01	Bahan		
1.1.7.02	Suku Cadang		
1.1.7.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		
1.1.7.04	Obat-Obatan		
1.1.7.05	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
1.1.7.06	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga		
1.1.7.07	Natura Dan Pakan		
1.1.7.08	Persediaan Penelitian		
1.1.7.09	Persediaan Dalam Proses		
1.1.7.10	Komponen		
1.1.7.11	P I P A		
1.1.7.12	Komponen Bekas Dan Pipa Bekas		
1.1.7.21	Persediaan Bahan Pakai Habis		
1.1.7.22	Persediaan Bahan/Material		
1.1.7.23	Persediaan Barang Lainnya		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1 . 1 . 8	<b>Aset Untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>D</b>	
1 . 1 . 8 . 01	R/K SKPD		
1 . 1 . 9	<b>Piutang Pajak</b>	<b>D</b>	
1 . 1 . 9 . 01	Piutang Pajak Hotel		
1 . 1 . 9 . 02	Piutang Pajak Restoran		
1 . 1 . 9 . 03	Piutang Pajak Hiburan		
1 . 1 . 9 . 04	Piutang Pajak Reklame		
1 . 1 . 9 . 05	Piutang Pajak Penerangan Jalan		
1 . 1 . 9 . 06	Piutang Pajak Parkir		
1 . 1 . 9 . 07	Piutang Pajak Air Tanah		
1 . 1 . 9 . 08	Piutang Pajak Sarang Burung Walet		
1 . 1 . 9 . 09	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
1 . 1 . 9 . 10	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		
1 . 1 . 9 . 11	Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		
1 . 1 . 10	<b>Penyisihan Piutang Pajak</b>	<b>D</b>	
1 . 1 . 10 . 01	Penyisihan Piutang Pajak Hotel		
1 . 1 . 10 . 02	Penyisihan Piutang Pajak Restoran		
1 . 1 . 10 . 03	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan		
1 . 1 . 10 . 04	Penyisihan Piutang Pajak Reklame		
1 . 1 . 10 . 05	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan		
1 . 1 . 10 . 06	Penyisihan Piutang Pajak Parkir		
1 . 1 . 10 . 07	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah		
1 . 1 . 10 . 08	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet		
1 . 1 . 10 . 09	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
1 . 1 . 10 . 10	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		
1 . 1 . 10 . 11	Penyisihan Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		
1 . 1 . 11	<b>Piutang Retribusi</b>	<b>D</b>	
1 . 1 . 11 . 01	Piutang Retribusi		
1 . 1 . 12	<b>Penyisihan Piutang Retribusi</b>	<b>D</b>	
1 . 1 . 12 . 01	Penyisihan Piutang Retribusi		
1 . 1 . 13	<b>Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi</b>	<b>D</b>	
1 . 1 . 13 . 01	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi		
1 . 1 . 14	<b>Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi</b>	<b>D</b>	
1 . 1 . 14 . 01	Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi		
1 . 1 . 15	<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>	<b>D</b>	
1 . 1 . 15 . 01	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
1 . 1 . 16	<b>Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>	<b>D</b>	
1 . 1 . 16 . 01	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
1 . 1 . 17	<b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b>D</b>	
1 . 1 . 17 . 01	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
1 . 1 . 18	<b>Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b>D</b>	
1 . 1 . 18 . 01	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
1 . 1 . 19	<b>Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan</b>	<b>D</b>	
1 . 1 . 19 . 01	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan		
1 . 1 . 20	<b>Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan</b>	<b>D</b>	
1 . 1 . 20 . 01	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan		
1 . 1 . 21	<b>Piutang Lainnya</b>	<b>D</b>	
1 . 1 . 21 . 01	Piutang Lainnya - BPKAD		
1 . 1 . 21 . 02	Piutang Lainnya - BLUD RSUD		
1 . 1 . 21 . 03	Piutang Lainnya - DPU		
1 . 1 . 22	<b>Penyisihan Piutang Lainnya</b>	<b>D</b>	
1 . 1 . 22 . 01	Penyisihan Piutang Lainnya		
1 . 2	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
1 . 2 . 1	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>D</b>	
1 . 2 . 1 . 01	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		
1 . 2 . 1 . 02	Investasi dalam Obligasi		
1 . 2 . 1 . 03	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
1 . 2 . 1 . 04	Dana Bergulir		
1 . 2 . 1 . 05	Deposito Jangka Panjang		
1 . 2 . 1 . 06	Investasi Non Permanen Lainnya		
1 . 2 . 2	<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>D</b>	
1 . 2 . 2 . 01	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
1 . 2 . 2 . 02	Investasi Permanen Lainnya		
1 . 3	<b>ASET TETAP</b>		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1.3.1	<b>Tanah</b>	<b>D</b>	
1.3.1.01	TANAH PERSIL		
1.3.1.02	TANAH NON PERSIL		
1.3.1.03	LAPANGAN		
1.3.1.61	Tanah Perkampungan		
1.3.1.62	Tanah Pertanian		
1.3.1.63	Tanah Perkebunan		
1.3.1.64	Kebun Campuran		
1.3.1.65	Hutan		
1.3.1.66	Kolam Ikan		
1.3.1.67	Danau/Rawa		
1.3.1.68	Tanah Tandus/Rusak		
1.3.1.69	Alang-alang dan Padang Rumput		
1.3.1.70	Tanah Pengguna Lain		
1.3.1.71	Tanah Untuk Bangunan Gedung		
1.3.1.72	Tanah Pertambangan		
1.3.1.73	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung		
1.3.1.74	Tanah untuk Taman		
1.3.2	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>D</b>	
1.3.2.01	ALAT BESAR DARAT		
1.3.2.02	ALAT BESAR APUNG		
1.3.2.03	ALAT BANTU		
1.3.2.04	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		
1.3.2.05	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		
1.3.2.06	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR		
1.3.2.07	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR		
1.3.2.08	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA		
1.3.2.09	ALAT BENGKEL BERMESIN		
1.3.2.10	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		
1.3.2.11	ALAT UKUR		
1.3.2.12	ALAT PENGOLAHAN		
1.3.2.13	ALAT KANTOR		
1.3.2.14	ALAT RUMAH TANGGA		
1.3.2.15	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		
1.3.2.16	ALAT STUDIO		
1.3.2.17	ALAT KOMUNIKASI		
1.3.2.18	PERALATAN PEMANCAR		
1.3.2.19	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI		
1.3.2.20	ALAT KEDOKTERAN		
1.3.2.21	ALAT KESEHATAN UMUM		
1.3.2.22	UNIT ALAT LABORATORIUM		
1.3.2.23	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR		
1.3.2.24	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH		
1.3.2.25	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA		
1.3.2.26	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN		
1.3.2.27	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA		
1.3.2.28	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		
1.3.2.29	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA		
1.3.2.30	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI		
1.3.2.31	SENJATA API		
1.3.2.32	PERSENJATAAN NON SENJATA API		
1.3.2.33	SENJATA SINAR		
1.3.2.34	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN		
1.3.2.35	KOMPUTER UNIT		
1.3.2.36	PERALATAN KOMPUTER		
1.3.2.37	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI		
1.3.2.38	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA		
1.3.2.39	ALAT PENGEBORAN MESIN		
1.3.2.40	ALAT PENGEBORAN NON MESIN		
1.3.2.41	SUMUR		
1.3.2.42	PRODUKSI		
1.3.2.43	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
1.3.2.44	ALAT BANTU EKSPLORASI		
1.3.2.45	ALAT BANTU PRODUKSI		
1.3.2.46	ALAT DETEKSI		
1.3.2.47	ALAT PELINDUNG		
1.3.2.48	ALAT SAR		
1.3.2.49	ALAT KERJA PENERBANGAN		
1.3.2.50	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN		
1.3.2.51	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI		
1.3.2.52	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT		
1.3.2.53	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1.3.2.54	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT		
1.3.2.55	PERALATAN OLAH RAGA		
1.3.2.61	Alat-Alat Besar Darat		
1.3.2.62	Alat-Alat Besar Apung		
1.3.2.63	Alat-alat Bantu		
1.3.2.64	Alat Angkutan Darat Bermotor		
1.3.2.65	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		
1.3.2.66	Alat Angkut Apung Bermotor		
1.3.2.67	Alat Angkut Apung Tak Bermotor		
1.3.2.68	Alat Angkut Bermotor Udara		
1.3.2.69	Alat Bengkel Bermesin		
1.3.2.70	Alat Bengkel Tak Bermesin		
1.3.2.71	Alat Ukur		
1.3.2.72	Alat Pengolahan		
1.3.2.73	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan		
1.3.2.74	Alat Kantor		
1.3.2.75	Alat Rumah Tangga		
1.3.2.76	Komputer		
1.3.2.77	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
1.3.2.78	Alat Studio		
1.3.2.79	Alat Komunikasi		
1.3.2.80	Peralatan Pemancar		
1.3.2.81	Alat Kedokteran		
1.3.2.82	Alat Kesehatan		
1.3.2.83	Unit-Unit Laboratorium		
1.3.2.84	Alat Peraga/Praktek Sekolah		
1.3.2.85	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		
1.3.2.86	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika		
1.3.2.87	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan		
1.3.2.88	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)		
1.3.2.89	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		
1.3.2.90	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika		
1.3.2.91	Senjata Api		
1.3.2.92	Persenjataan Non Senjata Api		
1.3.2.93	Amunisi		
1.3.2.94	Senjata Sinar		
1.3.2.95	Alat Keamanan dan Perlindungan		
1.3.3	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>D</b>	
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		
1.3.3.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL		
1.3.3.03	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI		
1.3.3.04	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN		
1.3.3.05	TUGU/TANDA BATAS		
1.3.3.61	Bangunan Gedung Tempat Kerja		
1.3.3.62	Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
1.3.3.63	Bangunan Menara		
1.3.3.64	Bangunan Bersejarah		
1.3.3.65	Tugu Peringatan		
1.3.3.66	Candi		
1.3.3.67	Monumen/Bangunan Bersejarah		
1.3.3.68	Tugu Peringatan		
1.3.3.69	Tugu Titik Kontrol/Pasti		
1.3.3.70	Rambu-Rambu		
1.3.3.71	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara		
1.3.4	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>D</b>	
1.3.4.01	JALAN		
1.3.4.02	JEMBATAN		
1.3.4.03	BANGUNAN AIR IRIGASI		
1.3.4.04	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT		
1.3.4.05	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER		
1.3.4.06	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM		
1.3.4.07	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH		
1.3.4.08	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU		
1.3.4.09	BANGUNAN AIR KOTOR		
1.3.4.10	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU		
1.3.4.11	INSTALASI AIR KOTOR		
1.3.4.12	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH		
1.3.4.13	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN		
1.3.4.14	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK		
1.3.4.15	INSTALASI GARDU LISTRIK		
1.3.4.16	INSTALASI PERTAHANAN		
1.3.4.17	INSTALASI GAS		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1.3.4.18	INSTALASI PENGAMAN		
1.3.4.19	INSTALASI LAIN		
1.3.4.20	JARINGAN AIR MINUM		
1.3.4.21	JARINGAN LISTRIK		
1.3.4.22	JARINGAN TELEPON		
1.3.4.23	JARINGAN GAS		
1.3.4.24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota		
1.3.4.25	Instalasi Perkebunan		
1.3.4.26	Jaringan CCTV		
1.3.4.28	Jaringan Internet		
1.3.4.61	Jalan		
1.3.4.62	Jembatan		
1.3.4.63	Bangunan Air Irigasi		
1.3.4.64	Bangunan Air Pasang Surut		
1.3.4.65	Bangunan Air Rawa		
1.3.4.66	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam		
1.3.4.67	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah		
1.3.4.68	Bangunan Air Bersih/Baku		
1.3.4.69	Bangunan Air Kotor		
1.3.4.70	Bangunan Air		
1.3.4.71	Instalasi Air Minum/Air Bersih		
1.3.4.72	Instalasi Air Kotor		
1.3.4.73	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik		
1.3.4.74	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
1.3.4.75	Instalasi Pembangkit Listrik		
1.3.4.76	Instalasi Gardu Listrik		
1.3.4.77	Instalasi Pertahanan		
1.3.4.78	Instalasi Gas		
1.3.4.79	Instalasi Pengaman		
1.3.4.80	Jaringan Air Minum		
1.3.4.81	Jaringan Listrik		
1.3.4.82	Jaringan Telepon		
1.3.4.83	Jaringan Gas		
1.3.5	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>D</b>	
1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK		
1.3.5.02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO		
1.3.5.03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN		
1.3.5.04	MUSIK		
1.3.5.05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)		
1.3.5.06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACTS AND REALITA		
1.3.5.07	TARSCALT		
1.3.5.08	BARANG BERCORAK KESENIAN		
1.3.5.09	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN		
1.3.5.10	TANDA PENGHARGAAN		
1.3.5.11	HEWAN PIARAAN		
1.3.5.12	TERNAK		
1.3.5.13	HEWAN LAINNYA		
1.3.5.14	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)		
1.3.5.15	CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)		
1.3.5.16	MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)		
1.3.5.17	COEENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)		
1.3.5.18	ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)		
1.3.5.19	AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)		
1.3.5.20	REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA)		
1.3.5.21	MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)		
1.3.5.22	ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)		
1.3.5.23	BIOTA PERAIRAN LAINNYA		
1.3.5.24	TANAMAN		
1.3.5.25	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		
1.3.5.26	ASET TETAP DALAM RENOVASI		
1.3.5.61	Buku		
1.3.5.62	Terbitan		
1.3.5.63	Barang-Barang Perpustakaan		
1.3.5.64	Barang Bercorak Kebudayaan		
1.3.5.65	Alat Olah Raga Lainnya		
1.3.5.66	Hewan		
1.3.5.67	Tanaman		
1.3.5.68	Aset Tetap Renovasi		
1.3.6	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>D</b>	
1.3.6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkampungan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1.3.6.02	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pertanian		
1.3.6.03	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkebunan		
1.3.6.04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kebun Campuran		
1.3.6.05	Konstruksi Dalam Pengerjaan Hutan		
1.3.6.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan Kolam Ikan		
1.3.6.07	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Danau/Rawa		
1.3.6.08	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tandus/Rusak		
1.3.6.09	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput		
1.3.6.10	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Pengguna Lain		
1.3.6.11	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Gedung		
1.3.6.12	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Pertambangan		
1.3.6.13	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung		
1.3.6.14	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Darat		
1.3.6.15	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-Alat Besar Apung		
1.3.6.16	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat-alat Bantu		
1.3.6.17	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Bermotor		
1.3.6.18	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		
1.3.6.19	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Bermotor		
1.3.6.20	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor		
1.3.6.21	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Bermotor Udara		
1.3.6.22	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Bermesin		
1.3.6.23	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Bengkel Tak Bermesin		
1.3.6.24	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Ukur		
1.3.6.25	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pengolahan		
1.3.6.26	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan		
1.3.6.27	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kantor		
1.3.6.28	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Rumah Tangga		
1.3.6.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan Komputer		
1.3.6.30	Konstruksi Dalam Pengerjaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
1.3.6.31	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Studio		
1.3.6.32	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Komunikasi		
1.3.6.33	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Pemancar		
1.3.6.34	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kedokteran		
1.3.6.35	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Kesehatan		
1.3.6.36	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit-Unit Laboratorium		
1.3.6.37	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Peraga/Praktek Sekolah		
1.3.6.38	Konstruksi Dalam Pengerjaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		
1.3.6.39	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika		
1.3.6.40	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan		
1.3.6.41	Konstruksi Dalam Pengerjaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)		
1.3.6.42	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		
1.3.6.43	Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika		
1.3.6.44	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Api		
1.3.6.45	Konstruksi Dalam Pengerjaan Persenjataan Non Senjata Api		
1.3.6.46	Konstruksi Dalam Pengerjaan Amunisi		
1.3.6.47	Konstruksi Dalam Pengerjaan Senjata Sinar		
1.3.6.48	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Keamanan dan Perlindungan		
1.3.6.49	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja		
1.3.6.50	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
1.3.6.51	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara		
1.3.6.52	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Bersejarah		
1.3.6.53	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Peringatan		
1.3.6.54	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Candi		
1.3.6.55	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya		
1.3.6.56	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti		
1.3.6.57	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Rambu-Rambu		
1.3.6.58	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara		
1.3.6.59	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan		
1.3.6.60	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan		
1.3.6.61	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi		
1.3.6.62	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Pasang Surut		
1.3.6.63	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Rawa		
1.3.6.64	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam		
1.3.6.65	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah		
1.3.6.66	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Bersih/Baku		
1.3.6.67	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Kotor		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
1.3.6.68	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air		
1.3.6.69	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Minum/Air Bersih		
1.3.6.70	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Air Kotor		
1.3.6.71	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Sampah		
1.3.6.72	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
1.3.6.73	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pembangkit Listrik		
1.3.6.74	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gardu Listrik		
1.3.6.75	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pertahanan		
1.3.6.76	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Gas		
1.3.6.77	Konstruksi Dalam Pengerjaan Instalasi Pengaman		
1.3.6.78	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum		
1.3.6.79	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Listrik		
1.3.6.80	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Telepon		
1.3.6.81	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Gas		
1.3.6.82	Konstruksi Dalam Pengerjaan Buku		
1.3.6.83	Konstruksi Dalam Pengerjaan Terbitan		
1.3.6.84	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang-Barang Perpustakaan		
1.3.6.85	Konstruksi Dalam Pengerjaan Barang Bercorak Kebudayaan		
1.3.6.86	Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Olah Raga Lainnya		
1.3.6.87	Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadaan Hewan		
1.3.6.88	Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanaman		
1.3.6.89	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi		
1.3.6.90	Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Renovasi		
1.3.7	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>D</b>	
1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		
1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		
1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan		
1.3.7.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
1.4	<b>DANA CADANGAN</b>		
1.4.1	<b>Dana Cadangan</b>	<b>D</b>	
1.4.1.01	Dana Cadangan		
1.5	<b>ASET LAINNYA</b>		
1.5.1	<b>Tagihan Jangka Panjang</b>	<b>D</b>	
1.5.1.01	Tagihan Penjualan Angsuran		
1.5.1.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
1.5.2	<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>D</b>	
1.5.2.01	Sewa		
1.5.2.02	Kerjasama Pemanfaatan		
1.5.2.03	Bangun guna serah		
1.5.2.04	Bangun serah guna		
1.5.3	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>D</b>	
1.5.3.01	Goodwill		
1.5.3.02	Lisensi dan frenchise		
1.5.3.03	Hak Cipta		
1.5.3.04	Paten		
1.5.3.05	Aset Tidak Berwujud Lainnya		
1.5.3.06	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
1.5.4	<b>Aset Lain-lain</b>	<b>D</b>	
1.5.4.01	Aset Lain-lain		
1.5.4.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		
1.5.5	<b>Aset Lain-Lain</b>	<b>D</b>	
1.5.5.01	Aset Lain-Lain		
1.5.6	<b>Amortisasi Aset Tak Berwujud</b>	<b>D</b>	
1.5.6.01	Amortisasi Aset Tak Berwujud		
1.5.7	<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</b>	<b>D</b>	
1.5.7.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		
2	<b>KEWAJIBAN</b>		
2.1	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
2.1.1	<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</b>	<b>K</b>	
2.1.1.01	Utang Taspen		
2.1.1.02	Utang Iuran Jaminan Kesehatan		
2.1.1.03	Utang PPh Pusat		
2.1.1.04	Utang PPN Pusat		
2.1.1.05	Utang Taperum		
2.1.1.06	Utang Iuran Wajib Pegawai		
2.1.1.07	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		
2.1.1.08	Utang Jaminan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
2 . 1 . 2	<b>Utang Bunga</b>	<b>K</b>	
2 . 1 . 2 . 01	Utang Bunga kepada Pemerintah		
2 . 1 . 2 . 02	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
2 . 1 . 2 . 03	Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD		
2 . 1 . 2 . 04	Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank		
2 . 1 . 2 . 05	Utang Bunga Obligasi		
2 . 1 . 2 . 06	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya		
2 . 1 . 2 . 07	Utang Bunga Luar Negeri		
2 . 1 . 3	<b>Bagian Lancar Utang Jangka Panjang</b>	<b>K</b>	
2 . 1 . 3 . 01	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		
2 . 1 . 3 . 02	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
2 . 1 . 3 . 03	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat		
2 . 1 . 3 . 04	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya		
2 . 1 . 3 . 05	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota		
2 . 1 . 4	<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>K</b>	
2 . 1 . 4 . 01	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		
2 . 1 . 4 . 02	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		
2 . 1 . 4 . 03	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		
2 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya		
2 . 1 . 5	<b>Utang Beban</b>	<b>K</b>	
2 . 1 . 5 . 01	Utang Beban Pegawai		
2 . 1 . 5 . 02	Utang Beban Barang dan Jasa		
2 . 1 . 5 . 03	Utang Beban Bunga		
2 . 1 . 5 . 04	Utang Beban Subsidi		
2 . 1 . 5 . 05	Utang Beban Hibah		
2 . 1 . 5 . 06	Utang Beban Bantuan Sosial		
2 . 1 . 5 . 07	Utang Beban Transfer		
2 . 1 . 5 . 08	Utang Beban Lain-lain		
2 . 1 . 5 . 09	Utang Beban Persediaan / Barang		
2 . 1 . 5 . 10	Utang Beban Jasa		
2 . 1 . 5 . 11	Utang Beban Pemeliharaan		
2 . 1 . 5 . 12	Utang Beban Perjalanan Dinas		
2 . 1 . 6	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>K</b>	
2 . 1 . 6 . 01	Utang Kelebihan Pembayaran PAD		
2 . 1 . 6 . 02	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		
2 . 1 . 6 . 03	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah		
2 . 1 . 6 . 04	Utang Jangka Pendek Lainnya		
2 . 1 . 6 . 05	Utang Pengadaan Aset Tetap		
2 . 1 . 6 . 06	Utang Pembiayaan		
2 . 1 . 6 . 07	Utang Pengadaan Aset tetap Lainnya		
2 . 1 . 7	<b>Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>K</b>	
2 . 1 . 7 . 01	R/K PPKD		
2 . 2	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
2 . 2 . 1	<b>Utang Dalam Negeri</b>	<b>K</b>	
2 . 2 . 1 . 01	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		
2 . 2 . 1 . 02	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
2 . 2 . 1 . 03	Utang Dalam Negeri-Obligasi		
2 . 2 . 1 . 04	Utang Pemerintah Pusat		
2 . 2 . 1 . 05	Utang Pemerintah Daerah Lainnya		
2 . 2 . 1 . 06	Utang Dalam Negeri Lainnya		
2 . 2 . 2	<b>Utang Jangka Panjang Lainnya</b>	<b>K</b>	
2 . 2 . 2 . 01	Utang Jangka Panjang Lainnya		
3	<b>EKUITAS</b>		
3 . 1	<b>EKUITAS</b>		
3 . 1 . 1	<b>Ekuitas</b>	<b>K</b>	
3 . 1 . 1 . 01	Ekuitas		
3 . 1 . 1 . 02	Koreksi Ekuitas		
3 . 1 . 2	<b>Surplus/Defisit LO</b>	<b>K</b>	
3 . 1 . 2 . 01	Surplus/Defisit LO		
4	<b>PENDAPATAN - LRA</b>		
4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>		
4 . 1 . 1	<b>Pendapatan Pajak Daerah - LRA</b>	<b>K</b>	
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA		
4 . 1 . 1 . 02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA		
4 . 1 . 1 . 03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA		
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Air Permukaan - LRA		
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Rokok - LRA		



KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
4.1.1.06	Pajak Hotel - LRA		
4.1.1.07	Pajak Restoran - LRA		
4.1.1.08	Pajak Hiburan - LRA		
4.1.1.09	Pajak Reklame - LRA		
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LRA		
4.1.1.11	Pajak Parkir - LRA		
4.1.1.12	Pajak Air Tanah - LRA		
4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet - LRA		
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA		
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA		
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA		
4.1.1.17	Pajak Lingkungan - LRA		
4.1.2	<b>Pendapatan Retribusi Daerah - LRA</b>	<b>K</b>	
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA		
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA		
4.1.2.03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA		
4.1.2.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA		
4.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA		
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA		
4.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA		
4.1.2.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA		
4.1.2.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA		
4.1.2.10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA		
4.1.2.11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA		
4.1.2.12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA		
4.1.2.13	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA		
4.1.2.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA		
4.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA		
4.1.2.16	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA		
4.1.2.17	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA		
4.1.2.18	Retribusi Terminal - LRA		
4.1.2.19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA		
4.1.2.20	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA		
4.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA		
4.1.2.22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LRA		
4.1.2.23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA		
4.1.2.24	Retribusi penyebrangan Air - LRA		
4.1.2.25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA		
4.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA		
4.1.2.27	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA		
4.1.2.28	Retribusi Izin Gangguan - LRA		
4.1.2.29	Retribusi Izin Trayek - LRA		
4.1.2.30	Retribusi Izin Perikanan - LRA		
4.1.2.31	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA		
4.1.2.32	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA		
4.1.2.33	Retribusi Izin Potong Hewan -LRA		
4.1.3	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA</b>	<b>K</b>	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA		
4.1.3.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN - LRA		
4.1.3.03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA		
4.1.4	<b>Lain-lain PAD Yang Sah - LRA</b>	<b>K</b>	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA		
4.1.4.02	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA		
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro - LRA		
4.1.4.04	Pendapatan Bunga - LRA		
4.1.4.05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA		
4.1.4.06	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA		
4.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA		
4.1.4.08	Pendapatan Denda Pajak - LRA		
4.1.4.09	Pendapatan Denda Retribusi - LRA		
4.1.4.10	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA		
4.1.4.11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA		
4.1.4.12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA		
4.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian		
4.1.4.14	Pendapatan lain lain- LRA		
4.1.4.15	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA		
4.1.4.16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA		
4.1.4.17	Pendapatan Zakat - LRA		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
4.1.4.18	Pendapatan BLUD - LRA		
4.1.4.19	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA		
4.1.4.20	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA		
4.1.4.21	Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA		
4.1.4.22	Hasil dari pengelolaan dana bergulir		
4.1.4.23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA		
4.1.4.24	Pendapatan Denda Sanksi Administrasi - LRA		
4.1.4.25	Pendapatan dari Pengumpan Bus Trans Sarbagita - LRA		
4.1.4.27	Plat IMB-LRA		
4.1.4.28	Sewa Hasil Tanah - LRA		
4.1.4.29	Dana BOS		
4.1.4.30	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN		
4.1.4.31	Penerimaan Lainnya- LRA		
4.1.4.32	...		
4.1.4.33	....		
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>		
4.2.1	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA</b>	<b>K</b>	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak - LRA		
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA		
4.2.1.03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		
4.2.1.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		
4.2.2	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA</b>	<b>K</b>	
4.2.2.01	Dana Otonomi Khusus - LRA		
4.2.2.02	Dana Keistimewaan - LRA		
4.2.2.03	Dana Penyesuaian - LRA		
4.2.3	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA</b>	<b>K</b>	
4.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		
4.2.3.02	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA		
4.2.3.03	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA		
4.2.4	<b>Bantuan Keuangan - LRA</b>	<b>K</b>	
4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA		
4.2.4.02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA		
4.2.4.03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA		
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>		
4.3.1	<b>Pendapatan Hibah - LRA</b>	<b>K</b>	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA		
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA		
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA		
4.3.1.05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LRA		
4.3.1.06	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga*)		
4.3.2	<b>Dana Darurat - LRA</b>	<b>K</b>	
4.3.2.01	Dana Darurat - LRA		
4.3.3	<b>Pendapatan Lainnya - LRA</b>	<b>K</b>	
4.3.3.01	Pendapatan Lainnya - LRA		
5	<b>BELANJA</b>		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>		
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>D</b>	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan		
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS		
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH		
5.1.1.04	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan		
5.1.1.05	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah		
5.1.1.06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		
5.1.1.07	Belanja Uang Lembur		
5.1.1.08	Belanja Perawatan dan Pengobatan		
5.1.1.09	Honorarium Pengelola Dana BOS		
5.1.1.10	Belanja Pegawai BLUD RSUD		
5.1.1.11	Honorarium PNS		
5.1.1.12	Bantuan Hari Raya		
5.1.1.13	Penghasilan Lainnya		
5.1.1.14	Honorarium Non PNS		
5.1.1.15	....		
5.1.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>D</b>	
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material		
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5.1.2.04	Belanja Premi Asuransi		
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan		
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas		
5.1.2.09	Belanja Sewa Alat Berat		
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman		
5.1.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
5.1.2.13	Belanja Pakaian Kerja		
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu		
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas		
5.1.2.16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas		
5.1.2.17	Belanja Pemulangan Pegawai		
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan		
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi		
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
5.1.2.21	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
5.1.2.22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS		
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS		
5.1.2.24	Belanja Honorarium Non Pegawai		
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS		
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS		
5.1.2.27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		
5.1.2.28	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS		
5.1.2.29	Belanja Barang Dana BOS		
5.1.2.30	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional		
5.1.2.31	Belanja BLUD		
5.1.2.32	Belanja Barang*)		
5.1.2.33	Belanja Jasa*)		
5.1.2.34	Belanja Jamkesda		
5.1.2.35	Belanja Ongkos Naik Haji		
5.1.2.36	Belanja Pasien Jampersal		
5.1.2.37	Belanja Penanganan Pasca Bencana		
5.1.2.38	Belanja Jasa Pemilahan dan Pengolahan Sampah		
5.1.2.39	dst		
5.1.3	<b>Belanja Bunga</b>	<b>D</b>	
5.1.3.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman		
5.1.3.02	Belanja Bunga Utang Obligasi		
5.1.4	<b>Belanja Subsidi</b>	<b>D</b>	
5.1.4.01	Belanja Subsidi		
5.1.5	<b>Belanja Hibah</b>	<b>D</b>	
5.1.5.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah		
5.1.5.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya		
5.1.5.03	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD		
5.1.5.04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat		
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan		
5.1.5.06	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar		
5.1.5.07	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi*)		
5.1.5.08	Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal*)		
5.1.5.10	Belanja Hibah Kepada Organisasi Profesi*)		
5.1.5.11	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kepemudaan*)		
5.1.5.12	Belanja Hibah Kepada Organisasi Olahraga*)		
5.1.5.13	Belanja Hibah Kepada Lembaga Pendidikan*)		
5.1.5.14	Belanja Hibah Untuk Keagamaan*)		
5.1.5.15	Belanja Hibah Bidang Pendidikan*)		
5.1.5.16	Hibah Industri Pariwisata Hotel dan Restoran		
5.1.6	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>D</b>	
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan		
5.1.6.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat		
5.1.6.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat*)		
5.1.6.04	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pendidikan		
5.1.6.05	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan*)		
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>		
5.2.1	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>D</b>	
5.2.1.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan		
5.2.1.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian		
5.2.1.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan		
5.2.1.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Campuran		
5.2.1.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan		
5.2.1.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5 . 2 . 1 . 07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa		
5 . 2 . 1 . 08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus/Rusak		
5 . 2 . 1 . 09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput		
5 . 2 . 1 . 10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain		
5 . 2 . 1 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung		
5 . 2 . 1 . 12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan		
5 . 2 . 1 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung		
5 . 2 . 1 . 14	Belanja Modal Tanah beserta Bangunan		
5 . 2 . 2	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>D</b>	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat		
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung		
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu		
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor		
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor		
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor		
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara		
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin		
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin		
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur		
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan		
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan		
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor		
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga		
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer		
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio		
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi		
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar		
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran		
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan		
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium		
5 . 2 . 2 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah		
5 . 2 . 2 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika		
5 . 2 . 2 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan		
5 . 2 . 2 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing		
5 . 2 . 2 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		
5 . 2 . 2 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika		
5 . 2 . 2 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api		
5 . 2 . 2 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api		
5 . 2 . 2 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi		
5 . 2 . 2 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Senjata Sinar		
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan		
5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>D</b>	
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja		
5 . 2 . 3 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal		
5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara		
5 . 2 . 3 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah		
5 . 2 . 3 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
5 . 2 . 3 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi		
5 . 2 . 3 . 07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya		
5 . 2 . 3 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti		
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu		
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara		
5 . 2 . 4	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>D</b>	
5 . 2 . 4 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan		
5 . 2 . 4 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan		
5 . 2 . 4 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi		
5 . 2 . 4 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut		
5 . 2 . 4 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa		
5 . 2 . 4 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA		
5 . 2 . 4 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah		
5 . 2 . 4 . 08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku		
5 . 2 . 4 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor		
5 . 2 . 4 . 10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air		
5 . 2 . 4 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih		
5 . 2 . 4 . 12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor		
5 . 2 . 4 . 13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah		
5 . 2 . 4 . 14	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		
5 . 2 . 4 . 15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik		
5 . 2 . 4 . 16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik		
5 . 2 . 4 . 17	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan		
5 . 2 . 4 . 18	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas		
5 . 2 . 4 . 19	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman		
5 . 2 . 4 . 20	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum		
5 . 2 . 4 . 21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik		
5 . 2 . 4 . 22	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon		
5 . 2 . 4 . 23	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas		
5 . 2 . 5	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>D</b>	
5 . 2 . 5 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku		
5 . 2 . 5 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan		
5 . 2 . 5 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan		
5 . 2 . 5 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan		
5 . 2 . 5 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya		
5 . 2 . 5 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan		
5 . 2 . 5 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman		
5 . 2 . 5 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi		
5 . 3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>		
5 . 3 . 1	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>D</b>	
5 . 3 . 1 . 01	Belanja Tak Terduga		
6	<b>TRANSFER</b>		
6 . 1	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>		
6 . 1 . 1	<b>Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah</b>	<b>D</b>	
6 . 1 . 1 . 01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota		
6 . 1 . 2	<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya</b>	<b>D</b>	

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
6 . 1 . 2 . 01	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa		
6 . 1 . 2 . 02	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa		
6 . 2	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>		
6 . 2 . 1	<b>Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>D</b>	
6 . 2 . 1 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi		
6 . 2 . 1 . 02	Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		
6 . 2 . 1 . 03	Transfer Bantuan Keuangan ke Yayasan		
6 . 2 . 2	<b>Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</b>	<b>D</b>	
6 . 2 . 2 . 01	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		
6 . 2 . 2 . 02	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Lainnya*)		
6 . 2 . 3	<b>Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</b>	<b>D</b>	
6 . 2 . 3 . 01	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik		
6 . 2 . 4	<b>Transfer Dana Otonomi Khusus</b>	<b>D</b>	
6 . 2 . 4 . 01	Transfer Dana Otonomi Khusus Kabuapten Kota		
7	<b>PEMBIAYAAN</b>		
7 . 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		
7 . 1 . 1	<b>Penggunaan SiLPA</b>	<b>K</b>	
7 . 1 . 1 . 01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya		
7 . 1 . 1 . 02	Koreksi SiLPA		
7 . 1 . 2	<b>Pencairan Dana Cadangan</b>	<b>K</b>	
7 . 1 . 2 . 01	Pencairan Dana Cadangan		
7 . 1 . 3	<b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>K</b>	
7 . 1 . 3 . 01	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
7 . 1 . 4	<b>Pinjaman Dalam Negeri</b>	<b>K</b>	
7 . 1 . 4 . 01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank		
7 . 1 . 4 . 02	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
7 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah		
7 . 1 . 4 . 04	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat		
7 . 1 . 4 . 05	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya		
7 . 1 . 4 . 06	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota		
7 . 1 . 5	<b>Penerimaan Kembali Piutang</b>	<b>K</b>	
7 . 1 . 5 . 01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara		
7 . 1 . 5 . 02	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah		
7 . 1 . 5 . 03	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat		
7 . 1 . 5 . 04	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
7 . 1 . 5 . 05	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		
7 . 1 . 6	<b>Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya</b>	<b>K</b>	
7 . 1 . 6 . 01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan		
7 . 1 . 6 . 02	Penarikan Dana Bergulir		
7 . 1 . 6 . 03	Pencairan Deposito Jangka Panjang		
7 . 1 . 6 . 04	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		
7 . 1 . 7	<b>Pinjaman Luar Negeri</b>	<b>K</b>	
7 . 1 . 7 . 01	Pinjaman Luar Negeri		
7 . 1 . 8	<b>Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya</b>	<b>K</b>	
7 . 1 . 8 . 01	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya		
7 . 2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		
7 . 2 . 1	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>	<b>D</b>	
7 . 2 . 1 . 01	Pembentukan Dana Cadangan		
7 . 2 . 2	<b>Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah</b>	<b>D</b>	
7 . 2 . 2 . 01	Penyertaan Modal pada BUMN		
7 . 2 . 2 . 02	Penyertaan Modal pada BUMD		
7 . 2 . 2 . 03	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
7 . 2 . 3	<b>Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri</b>	<b>D</b>	
7 . 2 . 3 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank		
7 . 2 . 3 . 02	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
7 . 2 . 3 . 03	Pelunasan Obligasi Daerah		
7 . 2 . 3 . 04	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
7 . 2 . 3 . 05	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya		
7 . 2 . 3 . 06	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota		
7 . 2 . 4	<b>Pemberian Pinjaman Daerah</b>	<b>D</b>	
7 . 2 . 4 . 01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara		
7 . 2 . 4 . 02	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah		
7 . 2 . 4 . 03	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
7.2.4.04	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
7.2.5	<b>Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya</b>	<b>D</b>	
7.2.5.01	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan		
7.2.5.02	Pembentukan Dana Bergulir		
7.2.5.03	Pembentukan Deposito Jangka Panjang		
7.2.5.04	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya		
7.2.6	<b>Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri</b>	<b>D</b>	
7.2.6.01	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		
7.2.7	<b>Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya</b>	<b>D</b>	
7.2.7.01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		
7.2.8	<b>Pembayaran Pokok Utang Kepada Pihak Ketiga</b>	<b>D</b>	
7.2.8.01	Pembayaran Pokok Utang Kepada Pihak Ketiga		
7.3	<b>SALDO ANGGARAN LEBIH</b>		
7.3.1	<b>Surplus/Defisit LRA</b>	<b>K</b>	
7.3.1.01	Surplus/Defisit LRA		
7.3.2	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>K</b>	
7.3.2.01	Pembiayaan Netto		
7.3.3	<b>SILPA/SIKPA</b>	<b>K</b>	
7.3.3.01	SILPA/SIKPA		
7.3.4	<b>Perubahan SAL</b>	<b>K</b>	
7.3.4.01	Perubahan SAL		
8	<b>PENDAPATAN - LO</b>		
8.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>		
8.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah - LO</b>	<b>K</b>	
8.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO		
8.1.1.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO		
8.1.1.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO		
8.1.1.04	Pajak Air Permukaan - LO		
8.1.1.05	Pajak Rokok - LO		
8.1.1.06	Pajak Hotel - LO		
8.1.1.07	Pajak Restoran - LO		
8.1.1.08	Pajak Hiburan - LO		
8.1.1.09	Pajak Reklame - LO		
8.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan - LO		
8.1.1.11	Pajak Parkir - LO		
8.1.1.12	Pajak Air Tanah - LO		
8.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet - LO		
8.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO		
8.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO		
8.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO		
8.1.1.17	Pajak Lingkungan - LO		
8.1.2	<b>Pendapatan Retribusi Daerah - LO</b>	<b>K</b>	
8.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO		
8.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO		
8.1.2.03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO		
8.1.2.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO		
8.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO		
8.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar - LO		
8.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO		
8.1.2.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO		
8.1.2.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO		
8.1.2.10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO		
8.1.2.11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO		
8.1.2.12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO		
8.1.2.13	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO		
8.1.2.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO		
8.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO		
8.1.2.16	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO		
8.1.2.17	Retribusi Tempat Pelelangan - LO		
8.1.2.18	Retribusi Terminal - LO		
8.1.2.19	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO		
8.1.2.20	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO		
8.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO		
8.1.2.22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO		
8.1.2.23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO		
8.1.2.24	Retribusi Penyebrangan Air - LO		
8.1.2.25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO		
8.1.2.26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
8 . 1 . 2 . 27	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO		
8 . 1 . 2 . 28	Retribusi Izin Gangguan - LO		
8 . 1 . 2 . 29	Retribusi Izin Trayek - LO		
8 . 1 . 2 . 30	Retribusi Izin Perikanan - LO		
8 . 1 . 2 . 31	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO		
8 . 1 . 2 . 32	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO		
8 . 1 . 2 . 33	Retribusi Izin Potong Hewan -LO		
8 . 1 . 3	<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO</b>	<b>K</b>	
8 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO		
8 . 1 . 3 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO		
8 . 1 . 3 . 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO		
8 . 1 . 4	<b>Lain-lain PAD Yang Sah - LO</b>	<b>K</b>	
8 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO		
8 . 1 . 4 . 02	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO		
8 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Jasa Giro - LO		
8 . 1 . 4 . 04	Pendapatan Bunga - LO		
8 . 1 . 4 . 05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO		
8 . 1 . 4 . 06	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO		
8 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO		
8 . 1 . 4 . 08	Pendapatan Denda Pajak - LO		
8 . 1 . 4 . 09	Pendapatan Denda Retribusi - LO		
8 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO		
8 . 1 . 4 . 11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO		
8 . 1 . 4 . 12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO		
8 . 1 . 4 . 13	Pendapatan dari Pengembalian -LO		
8 . 1 . 4 . 14	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO		
8 . 1 . 4 . 15	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO		
8 . 1 . 4 . 16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO		
8 . 1 . 4 . 17	Pendapatan Zakat - LO		
8 . 1 . 4 . 18	Pendapatan BLUD - LO		
8 . 1 . 4 . 19	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO		
8 . 1 . 4 . 20	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO		
8 . 1 . 4 . 21	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO		
8 . 1 . 4 . 22	Hasil dari pengelolaan dana bergulir		
8 . 1 . 4 . 23	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO		
8 . 1 . 4 . 24	Pendapatan Denda Sanksi Administrasi - LO		
8 . 1 . 4 . 25	Pendapatan dari Pengumpan Bus Trans Sarbagita - LO		
8 . 1 . 4 . 26	Sewa Hasil Tanah - LO		
8 . 1 . 4 . 27	Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN-LO		
8 . 1 . 4 . 28	Dana BOS		
8 . 1 . 4 . 29	Pendapatan Lain-lain BLUD - LO		
8 . 1 . 4 . 31	Penerimaan Lainnya - LO		
8 . 1 . 4 . 32	dst		
8 . 2	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>		
8 . 2 . 1	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO</b>	<b>K</b>	
8 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak - LO		
8 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO		
8 . 2 . 1 . 03	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO		
8 . 2 . 1 . 04	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO		
8 . 2 . 1 . 05	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK - Non Fisik) - LO		
8 . 2 . 2	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO</b>	<b>K</b>	
8 . 2 . 2 . 01	Dana Otonomi Khusus - LO		
8 . 2 . 2 . 02	Dana Keistimewaan - LO		
8 . 2 . 2 . 03	Dana Penyesuaian - LO		
8 . 2 . 3	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO</b>	<b>K</b>	
8 . 2 . 3 . 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		
8 . 2 . 3 . 02	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO		
8 . 2 . 3 . 03	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO		
8 . 2 . 4	<b>Bantuan Keuangan - LO</b>	<b>K</b>	
8 . 2 . 4 . 01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO		
8 . 2 . 4 . 02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO		
8 . 2 . 4 . 03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO		
8 . 3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>		
8 . 3 . 1	<b>Pendapatan Hibah - LO</b>	<b>K</b>	
8 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO		
8 . 3 . 1 . 02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO		



KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
8.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO		
8.3.1.04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO		
8.3.1.05	Pendapatan Hibah Dari Luar Negeri - LO		
8.3.1.06	Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga-LO*)		
8.3.2	<b>Dana Darurat - LO</b>	<b>K</b>	
8.3.2.01	Dana Darurat - LO		
8.3.3	<b>Pendapatan Lainnya - LO</b>	<b>K</b>	
8.3.3.01	Pendapatan Lainnya - LO		
8.4	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>		
8.4.1	<b>Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO</b>	<b>K</b>	
8.4.1.01	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO		
8.4.2	<b>Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO</b>	<b>K</b>	
8.4.2.01	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		
8.4.3	<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO</b>	<b>K</b>	
8.4.3.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		
8.5	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>		
8.5.1	<b>Pendapatan Luar Biasa - LO</b>	<b>K</b>	
8.5.1.01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO		
9	<b>BEBAN</b>		
9.1	<b>BEBAN OPERASI</b>		
9.1.1	<b>Beban Pegawai - LO</b>	<b>D</b>	
9.1.1.01	Beban Gaji dan Tunjangan - LO		
9.1.1.02	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO		
9.1.1.03	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO		
9.1.1.04	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO		
9.1.1.05	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah		
9.1.1.06	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		
9.1.1.07	Beban Uang Lembur - LO		
9.1.1.08	Beban Perawatan dan Pengobatan - LO		
9.1.1.09	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS		
9.1.1.10	Beban Pegawai BLUD RSUD		
9.1.1.11	Beban Honorarium PNS		
9.1.1.12	Beban Bantuan Hari Raya		
9.1.1.13	Penghasilan Lainnya		
9.1.1.14	Beban Honorarium Non PNS		
9.1.1.15	....		
9.1.2	<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>D</b>	
9.1.2.01	Beban Bahan Pakai Habis		
9.1.2.02	Beban Persediaan Bahan/ Material		
9.1.2.03	Beban Jasa Kantor		
9.1.2.04	Beban Premi Asuransi		
9.1.2.05	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor		
9.1.2.06	Beban Cetak dan Penggandaan		
9.1.2.07	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		
9.1.2.08	Beban Sewa Sarana Mobilitas		
9.1.2.09	Beban Sewa Alat Berat		
9.1.2.10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
9.1.2.11	Beban Makanan dan Minuman		
9.1.2.12	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya		
9.1.2.13	Beban Pakaian Kerja		
9.1.2.14	Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu		
9.1.2.15	Beban Perjalanan Dinas		
9.1.2.16	Beban Perjalanan Pindah Tugas		
9.1.2.17	Beban Pemulangan Pegawai		
9.1.2.18	Beban Pemeliharaan		
9.1.2.19	Beban Jasa Konsultasi		
9.1.2.20	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
9.1.2.21	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
9.1.2.22	Beban Beasiswa Pendidikan PNS		
9.1.2.23	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS		
9.1.2.24	Beban Honorarium Non Pegawai		
9.1.2.25	Beban Honorarium PNS - LO		
9.1.2.26	Beban Honorarium Non PNS - LO		
9.1.2.27	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		
9.1.2.28	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS		
9.1.2.29	Beban Barang Dana BOS		
9.1.2.30	Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
9.1.2.31	Beban BLUD		
9.1.2.32	Beban Barang*)		
9.1.2.33	Beban Jasa*)		
9.1.2.34	Beban Pasien Jampersal		
9.1.2.37	Beban Penanganan Pasca Bencana		
9.1.2.38	Beban Jasa Pemilahan dan Pengolahan Sampah		
9.1.2.39	dst.....		
9.1.3	<b>Beban Bunga</b>	<b>D</b>	
9.1.3.01	Beban Bunga Utang Pinjaman		
9.1.3.02	Beban Bunga Utang Obligasi		
9.1.4	<b>Beban Subsidi</b>	<b>D</b>	
9.1.4.01	Beban Subsidi		
9.1.5	<b>Beban Hibah</b>	<b>D</b>	
9.1.5.01	Beban Hibah kepada Pemerintah		
9.1.5.02	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
9.1.5.03	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD		
9.1.5.04	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat		
9.1.5.05	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan		
9.1.5.06	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar		
9.1.5.07	Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		
9.1.5.08	Beban Hibah kepada Instansi Vertikal*)		
9.1.5.10	Beban Hibah kepada Organisasi Profesi*)		
9.1.5.11	Beban Hibah kepada Organisasi Kepemudaan*)		
9.1.5.12	Beban Hibah kepada Organisasi Olah Raga*)		
9.1.5.13	Beban Hibah kepada Lembaga Pendidikan*)		
9.1.5.14	Beban Hibah Untuk Keagamaan*)		
9.1.5.15	Beban Hibah Bidang Pendidikan*)		
9.1.5.16	Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi*)		
9.1.5.17	Beban Hibah kepada Pihak Ketiga/Masyarakat		
9.1.5.18	Hibah Industri Pariwisata Hotel dan Restoran		
9.1.6	<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<b>D</b>	
9.1.6.01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan		
9.1.6.02	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat		
9.1.6.03	Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat*)		
9.1.6.04	Beban Bantuan Sosial Untuk Pendidikan		
9.1.6.05	Beban Bantuan Sosial Yang Tidak Dirrencanakan*)		
9.1.7	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>D</b>	
9.1.7.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		
9.1.7.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		
9.1.7.03	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan		
9.1.7.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
9.1.7.05	Beban Penyusutan Aset Lainnya		
9.1.7.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
9.1.8	<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>D</b>	
9.1.8.01	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan		
9.1.8.02	Beban Penyisihan Piutang Lainnya		
9.1.9	<b>Beban Lain-lain</b>	<b>D</b>	
9.1.9.01	Beban Penurunan Nilai Investasi		
9.1.9.02	Beban Penyisihan Dana Bergulir		
9.1.9.03	Beban Lain-lain		
9.1.10	<b>Beban Persediaan</b>	<b>D</b>	
9.1.10.01	Beban Persediaan Bahan Pakai Habis		
9.1.10.02	Beban Persediaan Bahan / Material		
9.1.10.03	Beban Persediaan Cetak dan Peggandaan		
9.1.10.04	Beban Persediaan Makanan dan Minuman		
9.1.10.05	Beban Persediaan Pakaian Dinas dan Atributnya		
9.1.10.06	Beban Persediaan Pakaian Kerja		
9.1.10.07	Beban Persediaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu		
9.1.10.08	Beban Barang		
9.1.11	<b>Beban Jasa</b>	<b>D</b>	
9.1.11.01	Beban Jasa Kantor		
9.1.11.02	Beban Jasa Premi Asuransi		
9.1.11.03	Beban Jasa Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		
9.1.11.04	Beban Jasa Sewa Sarana Mobilitas		
9.1.11.05	Beban Jasa Sewa Alat Berat		
9.1.11.06	Beban Jasa Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		
9.1.11.07	Beban Jasa Konsultansi		
9.1.11.08	Beban Jasa Beasiswa Pendidikan PNS		
9.1.11.09	Beban Jasa Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS		

KODE REKENING	URAIAN	SALDO NORMAL	PERATURAN
9 . 1 . 11 . 10	Beban Jasa Honorarium Non Pegawai		
9 . 1 . 11 . 11	Beban Jasa Honorarium PNS		
9 . 1 . 11 . 12	Beban Jasa Honorarium Non PNS		
9 . 1 . 11 . 13	Beban Jasa		
9 . 1 . 11 . 14	Beban Jasa Makanan dan Minuman		
9 . 1 . 12	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>D</b>	
9 . 1 . 12 . 01	Beban Pemeliharaan Perawatan Kendaraan Bermotor		
9 . 1 . 12 . 02	Beban Pemeliharaan Aset Tetap		
9 . 1 . 12 . 03	Beban Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		
9 . 1 . 13	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>D</b>	
9 . 1 . 13 . 01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
9 . 1 . 13 . 02	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah		
9 . 1 . 13 . 03	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri		
9 . 2	<b>BEBAN TRANSFER</b>		
9 . 2 . 1	<b>Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah</b>	<b>D</b>	
9 . 2 . 1 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota		
9 . 2 . 2	<b>Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya</b>	<b>D</b>	
9 . 2 . 2 . 01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa		
9 . 2 . 3	<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>D</b>	
9 . 2 . 3 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi		
9 . 2 . 3 . 02	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		
9 . 2 . 3 . 03	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Yayasan		
9 . 2 . 4	<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</b>	<b>D</b>	
9 . 2 . 4 . 01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		
9 . 2 . 4 . 02	Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Lainnya*)		
9 . 2 . 5	<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</b>	<b>D</b>	
9 . 2 . 5 . 01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik		
9 . 2 . 6	<b>Beban Transfer Dana Otonomi Khusus</b>	<b>D</b>	
9 . 2 . 6 . 01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota....		
9 . 3	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>		
9 . 3 . 1	<b>Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO</b>	<b>D</b>	
9 . 3 . 1 . 01	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		
9 . 3 . 2	<b>Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO</b>	<b>D</b>	
9 . 3 . 2 . 01	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		
9 . 3 . 3	<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO</b>	<b>D</b>	
9 . 3 . 3 . 01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		
9 . 4	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>		
9 . 4 . 1	<b>Beban Luar Biasa</b>	<b>D</b>	
9 . 4 . 1 . 01	Beban Luar Biasa		